BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggaraan transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai instrumen dalam industri keuangan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena merupakan industri yang sangat penting dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional.

Karena itulah pemerintah berupaya meningkatkan peran perbankan, salah satu langkah yaitu dengan mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan. Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan moneter yang penting pengaruhnya terhadap perkembangan moneter di Indonesia. Pertama, orientasi kredit yang bergeser mengarah pada pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit serta kredit suku bunga. Kedua, memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi dan mobilisasi tabungan domestik. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan iklim yang kondusif, dengan melakukan upaya menghapus pagu suku bunga, meningkatkan tabungan domestik dan mendorong *financial deepening* (munculnya produk finansial baru atau kombinasi baru dari instrumen perbankan yang telah ada).

Sejalan dengan perkembangan jumlah bank dan persaingan antara bank yang semakin sulit, maka untuk mengamankan kepentingan masyarakat diperlukan penyempurnaan atas pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank. Dewasa ini, tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, sehingga aktivitas usaha bank harus diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta kondisi ekonomi nasional dan global. Dalam negara yang semakin maju sangat dibutuhkan peranan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank memegang peranan penting dalam perekonomian terutama dalam melaksanakan tugas distribusi, karena ia bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bank sebagai instrumen dalam industri keuangan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena merupakan industri yang sangat strategis dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional, ini terlihat dari cukup banyaknya peraturan dan kebijaksanaan yang mengatur kegiatan bank di Indonesia.

Tambunan (2002:14) menyebutkan bidang keuangan lebih diatur dibanding dengan bidang lain karena berbagai alasan, antara lain :

 Agar kesehatan dan keamanan lembaga keuangan maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan terjaga

- 2. Agar stok jumlah uang beredar terkontrol sehingga stabilitas tingkat harga terjaga
- 3. Agar persaingan yang terjadi dalam industri keuangan tetap sehat

Karena itulah pemerintah berupaya meningkatkan peran bank dengan mengeluarkan paket deregulasi, dan sejak dikeluarkannya paket tesebut dunia keuangan khususnya bank berkembang pesat. Ini terlihat dari banyaknya pendirian bank baru dan pembukaan cabang baru.

Dikeluarkannya, Paket Deregulasi 1 Juni 1983, yang bertujuan untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, kemandirian dan juga meningkatkan penggunaan sumber daya dalam negeri. Kemudian, Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 27, 1988), bertujuan meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor non-migas, efisiensi lembaga keuangan, kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter serta iklim pengembangan pasar modal. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pemerintah menetapkan serangkaian langkah-langkah kebijakan di bidang perbankan yang merupakan sasaran kebijakan keuangan pemerintah, seperti pemberian kemudahan dalam syarat-syarat pendirian bank, ketentuan batas minimum pemberian kredit (legal lending limit), diturunkannya likuiditas wajib minimum untuk perbankan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga, serta pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka. Sehingga tindakan tersebut mengakibatkan munculnya banyak bank. Hal ini dikarenakan kemudahankemudahan yang diberikan dalam pendirian bank yang bertujuan untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat dan meningkatkan efisiensi lembaga

keuangan dan perbankan. Selain itu, adanya Paket Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan, 29, 1990) pemerintah mewajibkan bagi semua bank umum nasional mengalokasikan minimum 20% kreditnya untuk disalurkan kepada sektor usaha kecil.

Sejak saat itu, jenis kegiatan bank umum berkembang dengan pesat, salah satu kegiatan bank yaitu menyalurkan kredit ke masyarakat yang memegang peranan penting bagi kehidupan bank umum di negara manapun di dunia ini. Hal lain yang menyebabkan kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi kehidupan bank umum karena kredit merupakan bagian terbesar sumber penghasilan dan bagian terbesar dari seluruh harta bank. Kegiatan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank umum. *Likuiditas* keuangan, *solvabilitas*, dan *profitabilitas* bank umum sangat dipengaruhi oleh keberhasilan suatu bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Selain prinsip kehati-hatian (*prudential approach*), manajemen resiko dan pengawasan internal perlu ditingkatkan. Untuk meng-cover resiko kredit perlu diciptakan sebuah sistem yang mengharuskan kalangan perbankan mencadangkan modal yang lebih besar atas pinjaman yang mempunyai tingkat resiko yang relatif tinggi.

Dikeluarkannya paket kebijakan bidang keuangan tersebut merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembangunan yang pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengarahkan pendapatan masyarakat sehingga lebih adil dan merata. Pembangunan nasional bertujuan

untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan dinamis. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan menurut Sinungan (2001:18) adalah :

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
- 2) memberikan kredit

Adanya perbedaan fungsi ini diharapkan kinerja masing-masing bank akan lebih optimal dalam melayani masyarakat, masing-masing bank memiliki spesialisasi dalam kegiatan usahanya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan lebih memfokuskan kegiatannya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Dengan makin terfokusnya kegiatan usaha bank akan mendorong masyarakat meminta kredit pada bank, sebab kebutuhan kredit mereka akan lebih cepat dipenuhi.

Pengelolaaan piutang/kredit bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang/kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi di luar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang/kreditnya perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan, agar perencanan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi

perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan kredit/piutang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

Memperoleh keuntungan/profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan maupun bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Bank Perkreditan Rakyat. Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Profit/keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan, maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan revenue yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi dengan nilai jual produk/jasanya. Revenue yang diperoleh atas penjualan dapat berupa kas dan piutang, dimana kas terjadi karena produknya dijual secara tunai, sedangkan piutang terjadi karena penjualan dilakukan secara kredit.

Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga elemen yaitu pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan swasta yang memberi peluang kepada setiap

warga negara untuk berkompetisi dalam bidang ekonomi. Tiga elemen inilah yang sangat menentukan pertumbuhan pereonomian di Indonesia. Sebagai satuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, peran bank tidaklah bisa diabaikan dalam keikutsertaan menyemarakkan kehidupan perekonomian negara. Untuk itulah pengembangan bank sangat diperlukan agar bank dapat menempatkan dirinya sebagai suatu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lainnya. Apalagi di era globalisasi saat ini dimana terjadi perdagangan bebas dan persaingan secara global, bangsa Indonesia harus lebih mempersiapkan kondisi perekonomiannya. Salah satu jalan yang bisa di tempuh adalah dengan memperkokoh sektor perbankan sebagai pendukung kegiatan perekonomian nasional.

Bank sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi. Peranan bank yang telah berhasil di kembangkan perlu didorong dan ditingkatkan agar semakin dapat memegang peranan utama di dalam kehidupan ekonomi. Usaha-usaha pada sektor bank harus disertai pembinaan agar kegiatan bank dan peranan anggota bank semakin meningkat, sehingga manfaat bank makin dinikmati oleh anggotanya yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Simorangkir (2003:41) menyebutkan dalam kaitannya dengan pembinaan bank, maka untuk melihat perkembangan bank dapat dilihat melalui tiga kriteria berikut :

1. Sehat Mental

Maju mundurnya bank tergantung pada sehatnya mental para pengurusnya dalam menggerakkan roda bank. Para pengurus hendaknya mementingkan kepentingan bersama daripada kepantingan diri sendiri.

2. Sehat Organisasi

Sehat organisasi berarti bank benar-benar berjalan diatas relnya, yaitu berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai organisasi yang sehat maka bank harus benar-benar mendayagunakan unit manajemen pengurus, unit manajemen badan pemeriksa dan unit manajemen usaha bank seoptimal mungkin.

3. Sehat Usaha

Sehat usaha berarti usaha yang dilaksanakan merupakan realisasi keinginan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Usaha yang dilaksanakan harus dapat memberikan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan atau biaya penyelenggaraannya.

Sebagai lembaga kredit, bank ini melepaskan dananya demi dua tujuan ekonomis yaitu *profitability* yang di dapatkan dari pemungutan bunga dan *safety* atau terjaminnya dana yang dilepaskan bisa kembali tepat waktu sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai. *Profitability* dan *safety* harus berjalan bersama-sama. Adanya kredit yang diberikan oleh bank simpan pinjam merupakan suatu investasi modal kerja yang mempunyai resiko cukup besar. Resiko yang timbul dari adanya

kredit yang diberikan adalah keterlambatan dalam pelunasan kredit dan kemungkinan tidak tertagihnya sebagian maupun seluruh piutang.

Keterlambatan dalam pembayaran piutang akan mengakibatkan periode terikatnya modal dalam piutang menjadi semakin lama sehingga tingkat perputaran piutang menjadi semakin lemah. Penumpukan modal kerja yang terlalu besar pada piutang akan menimbulkan kesulitan keuangan yang serius yang menyebabkan bank simpan pinjam kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil dari dana yang tertanam dalam piutang. Piutang mempunyai sifat yang cukup sulit untuk ditentukan secara pasti kapan piutang tersebut akan dilunasi oleh nasabah. Karena tidak jarang nasabah tidak menepati janji atas pemberian kredit yang telah disepakati. Sebaliknya apabila piutang tidak diberikan, nasabah akan berpaling pada perusahaan pesaing yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran piutangnya.

Deregulasi perbankan tahun 1983 dan 1988 telah memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor finansial dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai dan memacu pihak perbankan untuk bersaing dalam memobilisasi dan mengerahkan dana perbankan secara besar-besaran. Namun akibatnya banyak pihak perbankan yang memberikan kredit melebihi batas minimal yang ditetapkan pemerintah, sehingga jumlah kredit macet meningkat. Dengan adanya kasus kredit macet di beberapa bank tersebut menyebabkan pihak perbankan menjadi ragu-ragu menyalurkan kreditnya.

Keadaan ini telah mendorong otoritas moneter mengeluarkan paket 28 Februari 1991 yang pada dasarnya bermaksud menerapkan *prudent banking* regulation sebagaimana yang dianut dalam industri perbankan di berbagai negara. Paket tersebut ditujukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasi perbankan yang antara lain menyangkut *CAR (Cpital Adequity Ratio)*, *LDR (Long to Debt Ratio)*, serta perbaikan sistem dan manajemen perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul : Pengelolaan Kredit yang Efektif untuk Meningkatkan *Likuiditas* dan *Profitabilitas* (Studi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Raga Surya Nuansa (PT. BPR RASUNA) Ponorogo).

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pengelolaan kredit yang efektif dalam meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. BPR. Raga Surya Nuansa Ponorogo?
- 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan kredit yang efektif dalam meningkatkan *Likuiditas* dan *Profitabilitas* pada PT. BPR. Raga Surya Nuansa Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengelolaan kredit yang efektif dalam meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. BPR. Raga Surya Nuansa Ponorogo.
- Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan kredit yang efektif dalam meningkatkan *Likuiditas* dan *Profitabilitas* pada PT.
 BPR. Raga Surya Nuansa Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Merupakan upaya memperdalam ilmu pengetahuan yang dapat menjadi tambahan khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan manajemen keuangan terutama pada aspek pengelolaan kredit yang efektif, tingkat *likuiditas* dan *profitabilitas*.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi PT. BPR. Raga Surya Nuansa Ponorogo dalam merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan khususnya pada pengelolaan kredit agar dapat meningkatkan *Likuiditas* dan *Profitabilitas*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang berhubungan atau terkait dengan penelitian ini antara lain teori tentang pengertian kredit :

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, subyek dan informan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan rancangan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil yang didapat selama dalam proses penelitian di lapangan yang disajikan dalam bagian penyaji data. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap data yang telah disajikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan serta saran-saran pada perusahaan.

